

**PELAKSANAAN OPEN GOVERNMENT MELALUI WEBSITE DESA  
(Studi Kasus Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo  
Kabupaten Bojonegoro)**

**Fifi Nur Afni O., Rupiarsieh, Sri Kasiami**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec.Bojonegoro  
Email : [arsieh\\_sakti@yahoo.com](mailto:arsieh_sakti@yahoo.com)

**Abstraction**

The Prayungan Village website is an innovation in the implementation of Open Government by utilizing information technology media as a medium for conveying information from the Village Government to the Village Community in order to realize open government, as well as in providing the best service to the community to be more effective and efficient. However, the problem that arises is that the full involvement of the public is not yet optimal.

The purpose of this study was to evaluate the implementation of Open Government through the Village Website in Prayungan Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency. The type of research is descriptive research with a qualitative approach. The research focus is on the Implementation of Open Government through Village Websites as measured by the principles of Open Government according to Global Integrity through three aspects, namely: Transparency, Participation, and Accountability.

The results of the study, the Prayungan Village Government in carrying out its government is quite transparent, both in conveying information and openness of its budget, all development processes and policy making involve the community. From the aspect of participation, the Prayungan Village community is enthusiastic about various activities in the village. Mutual cooperation activities and the provision of community self-help funds are still ongoing. In terms of accountability, it can be seen that the community has various levels of trust in the Village Government in carrying out their duties, and has an awareness of their rights and obligations as a village community.

*Keywords: Open Government, Website, Prayungan Village.*

**Abstraksi**

*Website* Desa Prayungan merupakan sebuah inovasi dalam pelaksanaan *Open Government* dengan memanfaatkan media teknologi informasi sebagai media penyampai informasi dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa demi mewujudkan pemerintahan terbuka, serta dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Namun, masalah yang muncul adalah belum optimalnya keterlibatan penuh publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan *Open Government* melalui *Website* Desa di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jenis riset adalah penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Focus penelitian pada Pelaksanaan *Open Government* melalui *Website* Desa yang diukur dalam prinsip *Open Government* menurut Global Integrity melalui tiga aspek yaitu: Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

Hasil penelitian, Pemerintah Desa Prayungan dalam melaksanakan pemerintahannya terbilang cukup transparan, baik dalam menyampaikan informasi maupun keterbukaan anggarannya, segala proses pembangunan dan pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat. Dari aspek partisipasi, masyarakat Desa Prayungan antusias terhadap berbagai kegiatan yang ada di Desa. Kegiatan gotong royong dan pengadaan dana swadaya masyarakat masih berjalan. Dari sisi akuntabilitas, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan beragam terhadap Desa, serta memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Desa.

Kata kunci : *Open Government, Website, Desa Prayungan.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini menjelaskan, Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang didasarkan dalam undang-undang 1945.

Selain itu Desa memiliki peranan yang penting dalam menunjang segala urusan dan program pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan Desa merupakan unit terkecil pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki kepentingan dan urusannya, salah satunya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Desa.

Dalam menjalankan pemerintahan desa harus bersifat terbuka, karena keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas segala keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Keterbukaan juga dibutuhkan untuk meningkatkan peranserta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan serta memberikan masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Maka dari itu masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi baik itu melalui media elektronik maupun papan pengumuman. Pernyataan tersebut diperkuat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 68 ayat (1) huruf (a) tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa masyarakat Desa berhak

memiliki dan mendapatkan informasi dari pemdes dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Seiring dengan keterbukaan ini, Pada 8 April 2016 Tim *Open Government Partnership*(OGP) menyatakan, Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu pilot project keterbukaan Pemerintah Terbuka (*Open Government*) dari 15 pemerintah daerah lain di dunia. Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai pelopor program OGP berbasis pemerintahan lokal menunjukkan adanya kemauan inovasi yang kuat untuk melakukan reformasi dan transformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang terbuka terutama dalam pengelolaan kebijakannya.

Adapun kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu antara lain Forum Jumat, dialog publik antara Bupati dengan masyarakat yang digelar secara rutin setiap hari jumat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, publikasi anggaran Dana Desa di ruang publik, dan juga pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik (Huda, 2019).

Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro menjadi wakil Indonesia dalam *Open Government Partnership* tidak sertamerta terpilih begitu saja. Namun ada proses panjang yang dilalui oleh Pemkab Bojonegoro dalam komitmennya membuka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mengingat pada 2007 Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten termiskin nomor 3 di Jawa Timur, padahal Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi yang melimpah. Namun permasalahan yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Adapun permasalahannya, kemiskinan endemis, korupsi di pemerintahan, infrastruktur dengan kualitas yang rendah, pelayanan publik dengan kualitas rendah, APBD yang rendah dan memiliki hutang

dalam pembiayaan pembangunan, tidak ada komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

Sehingga mulai 2008 Kabupaten Bojonegoro berbenah dengan mulai menerapkan Pemerintahan terbuka. Berbagai kasus-kasus korupsi mulai terungkap. Berdasarkan informasi yang dikutip dalam kompas.com di tahun 2008 di Kabupaten Bojonegoro terdapat lima kasus korupsi. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari surya.co.id, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2013 mendapatkan peringkat pertama daerah terkorup di Jawa Timur dengan tujuh kasus korupsi. Untuk itu, transparansi dalam pengelolaan wajib dilakukan, demi mencegah korupsi terjadi.

Meski demikian, pada 2019 ada 369 desa yang belum sepenuhnya mentransparansikan APBDes. Maka dari itu, Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya diharuskan menerapkan keterbukaan informasi publik, baik secara manual melalui papan pengumuman maupun dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Seiring perkembangan zaman di era digital sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro telah berbenah, termasuk dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana media komunikasi Pemerintah Desa dengan masyarakat Desanya, serta media penyampaian informasi. Salahnya berupa *Website* Desa sebagai alat penyampai informasi dan penerapan keterbukaan informasi publik demimewujudkan pemerintahan terbuka.

Salah satunya adalah Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo. Desa Prayungan adalah salah satu Desa yang mewakili Kabupaten Bojonegoro dalam ajang lomba Keterbukaan Informasi Publik. Dalam ajang ini Desa Prayungan meraih tiga penghargaan, yakni Kategori Penyedia

Layanan Informasi tersedia Setiap Saat Terbaik Jawa Timur, Kategori Penyedia Layanan Informasi Terbaik Jawa Timur, dan Kategori Badan Publik Menuju Informatif Terbaik Jawa Timur. Selain itu juga dinobatkan sebagai Desa dengan keterbukaan informasi publik terbaik di Kabupaten Bojonegoro.

Meski telah meraih penghargaan terbaik, permasalahan dalam pengelolaan webdes di Desa Prayungan masih ada. Salah satu faktornya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap sebagian masyarakat Desa, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dengan Kantor Kepala Desa, sehingga mereka cenderung tertinggal informasi, termasuk informasi mengenai pemanfaatan website desa. Bahkan sebagian dari mereka ada yang belum pernah mengakses dan memanfaatkan website Desa.

Secara teoritik, pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Rahardjo Adisasmita menjelaskan, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya (Adisasmita, 2011).

Adapun faktor-faktor yang menunjang konsep pelaksanaan adalah (a) komunikasi: merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. (b) Resouces (Sumber daya): meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan dan kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Kemudian, (c) Disposisi: sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadikan pelaksana program. Dan (d) Struktur birokrasi, yaitu *Standar Operating Procedures*, yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Sedangkan *Open Government* merupakan budaya pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif. *Open Government* menurut Global Integrity mencangkup tiga hal, yakni transparansi informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Dengan adanya informasi pemerintahan yang transparan, masyarakat akan lebih mudah memahami cara kerja pemerintah. Melalui keterlibatan publik, publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah karena publik dilibatkan dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian pelayanan pemerintah serta proses pemberian pelayanan. Dan akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini dengan informan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, masyarakat, Lembaga pemdes, dan petugas pengelola webdes. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data interaktif model Miles & Huberman.

Adapun fokus penelitiannya meliputi:

(a) Transparansi Informasi. Aspek

transparansi informasi yang diukur dari indikator- indikator pengukuran menurut Agus Dwiyanto, yakni : Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, serta kejelasan dan kelengkapan informasi; Keterbukaan proses; dan Kerangka regulasi. (b) Partisipasi Masyarakat: Aspek Partisipasi diukur dengan indikator: Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotongroyong; Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.

Kemudian, (c) Akuntabilitas, yang diukur dengan indikator- indikator menurut Teguh Kurniawan, yakni: meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa; timbulnya kesadaran tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Transparansi Informasi

Desa Prayungan dalam menransparansikan informasi telah memanfaatkan berbagai media, baik secara manual yakni melalui banner maupun papan informasi, juga telah memanfaatkan media teknologi berupa *website* maupun media sosial lainnya. Namun dalam hal tersebut masih terdapat kekurangannya yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat hanya tahu tapi tidak paham pemanfaatannya. Selain itu terdapat juga kekurangan dari masyarakat desa yang belum peduli dengan hal tersebut.

Dari dimensi ketersediaan, kelengkapan, kejelasan dan aksesibilitas dokumen dalam *Website* Desa memiliki artian saat masyarakat membutuhkan informasi terkait Desa tidak perlu datang langsung ke Kantor Kepala Desa, cukup mengaksesnya melalui Website Desa. Dalam hal ini, *website* Desa Prayungan terbilang

cukup lengkap. Namun perlu ditambahkan informasi terutama informasi terkait pertanian. Dan untuk aksesabilitas dokumen pengunjung maupun pemohon dokumen melalui *Website* Desamengalami kenaikan dan penurunan, jadi tidak selalu tetap.

Dalam dimensi keterbukaan proses, yakni pemerintah yang melibatkan masyarakat desa, dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, juga telah ada di webdesa. Salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan program dan kebijakan adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2016-2022.

Kemudian, dari aspek Kerangka Regulasi. Yakni, kerangka yang harus dilalui untuk melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan. Dalam menjalankan pemerintahan terbuka melalui Website Desa di Desa Prayungan, kerangka regulasi yang mengatur tercantum dalam *website* Desa. Yakni, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 terkait dengan standar pelayanan publik di Desa. Dan semua regulasi yang mengatur pengelolaan desa dan *Website* Desa sudah lengkap diunggah di *Website*.

#### **b. Partisipasi Masyarakat**

Dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdapat beberapa indikator-indikatornya yakni:

##### **Sumbangan pemikiran masyarakat**

Semua keputusan dan kebijakan dalam pembangunan Desa dari sumbangan pemikiran masyarakat,

masyarakat juga aktif dalam menyampaikan gagasannya demi kemajuan desa. Dan itu hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan Desa.

*"Jadi, mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pelaporan semua melibatkan masyarakat. Seperti misal kalau ada Musrenbang desa, tidak semua masyarakat bisa hadir, hanya perwakilan saja. Maka, kalau menghadapi musrenbang, kami persilahkan untuk setiap RT menyampaikan kepada masyarakat dan RT juga menampung setiap usulan masyarakat dari masyarakat. Dan usulan tersebut nantinya disampaikan dalam musrenbang."* (Wawancara Kades Rofii, 7 Juni 2021).

Selain itu, Karang Taruna bersama Pemerintah Desa juga menggelar Diskusi Publik dengan tema *Ngudo Roso*. Dalam kegiatan tersebut Karang Taruna bersama pemerintah desa dan masyarakat desa diberikan kebebasan dalam menyampaikan gagasan dan kritikan terhadap pemerintahan desa maupun lembagapemerintahan desa.

##### **Sumbangan tenaga masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana yang dapat dilakukan dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau gotong royong. Di Desa Prayungan, kegiatan itu masih ada. Biasanya kegiatannya berbentuk kerjabakti, mulai dari pembersihan lingkungan sampai fasilitas umum seperti masjid dan tempat Pendidikan hingga penanaman pohon. Kegiatan gotong royong di Desa Prayungan masih berjalan dengan baik, serta mendapatkan respon positif bagi masyarakat.

##### **Sumbangan dana dalam swadaya**

## **masyarakat**

Salah satu dari bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan dan kegiatan yang dilakukan di Desa Prayungan adalah dalam bentuk uang dan benda yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela dalam kegiatan maupun dalam pembangunan desa. Biasanya sumbangan diberikan dalam kegiatan insidental, seperti pada Agustusan atau karnaval.

### **c. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam akuntabilitas terdapat indikator pengukurannya.

#### **Meningkatnya kepercayaan publik**

Data di lapangan menunjukkan, dengan dipublikasikannya semua anggaran keuangan melalui papan nama dan webdesa, sebagian besar masyarakat desa telah memiliki tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa bermacam-macam, tergantung pada penilaian dari masing-masing individu, namun pemerintah desa tetap perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **Timbulnya kesadaran hak**

Salah satu indikator keberhasilan dalam mengukur aspek akuntabilitas adalah timbulnya kesadaran hak masyarakat untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa Prayungan ini kesadaran hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa cukup tinggi. Ini

bisa dilihat sewaktu acara diskusi publik *ngudo roso* yang dilaksanakan di Pujasera Ndayohan. Waktu itu masyarakat memiliki hak leluasa menilai pemerintah Desa, serta mendiskusikan segala unek-uneknya. Dan Pemerintah Desa dengan senang hati menanggapi.

Sebagaimana disampaikan oleh M. Ahmahmudin Anwari, Ketua Karang Taruna Desa Prayungan. *"Dalam diskusi publik yang diadakan Karang Taruna, masyarakat bebas menyampaikan apapun, entah itu kritik, saran, dan lain sebagainya. Dan saat kita membuka kritik dan saran. Pemerintah desa sangat wellcome dan menerima apa yang kita sampaikan tadi."* (Wawancara pada 12 Juni 2021 berlokasi di Warkop Ngampel).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari temuan-temuan yang dilakukan saat penelitian, maka penyimpulan akhir mengenai Pelaksanaan *Open Government* Melalui *Website* Desa, adapun temuan-temuan tersebut sebagai berikut :

- a. Jika dinilai dari Aspek Transparansi, dapat diketahui bahwa Desa Prayungan dalam menjalankan pemerintahan desanya sudah transparan. Berbagai informasi dan anggaran telah tercantum didalam *Website* Desa, namun masih kurang adanya sosialisasi dengan masyarakat awan. Dari kelengkapan dokumen dan informasi yang ada didalam *Website* Desa terbilang cukup lengkap, namun perlu ditambahkan lagi informasi tentang pertanian maupun terkait kegiatan-kegiatan Desa yang masih belum dicantumkan. Pemerintah Desa Prayungan dalam mengambil proses kebijakan maupun dalam perumusan rencana kerja sudah sangat terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari proses perencanaan dan pengusulan program,

proses pelaksanaan program, proses pelaporan hingga proses pembukuan program. Seluruh kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan *Open Government*, maupun pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya telah di unggah didalam *Website* Desa, sehingga sangat memudahkan masyarakat mendapatkannya.

- b. Dinilai dari Aspek Partisipasi, dapat disimpulkan masyarakat dalam menyampaikan gagasan dalam musdes cukup aktif, namun hanya sebagian. Tidak adanya pembatasan untuk masyarakat agar menyampaikan idenya, bahkan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir dalam musyawarah tersebut dapat menyampaikan idenya kepada pihak RT atau RW. Lalu RT atau RW setempat akan menyampaikan idenya dalam Musyawarah Desa. Pemerintah Desa mendukung segala kegiatan positif yang diadakan masyarakat dan lembaga pemerintahan masyarakat. Kegiatan gotong royong di Desa Prayungan masih berjalan, dan masyarakat masih sangat berpartisipasi dengan kegiatan tersebut. Masyarakat berpartisipasi dalam pemberian dana swadaya demi keberlangsungan kegiatan yang berada di Desa.
- c. Jika dinilai dari Aspek Akuntabilitas, maka didapat temuan bahwa : Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa bermacam-macam, tergantung penilaian dari individu, namun perlunya peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa. Dan sebagian besar masyarakat Desa Prayungan telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam menilai dan mengawasi penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berjalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

- A.D., Siti Irene, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011.
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Surakarta, 2015.
- Haif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Indarjit dkk, *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bitra Indonesia, Medan, 2013.
- Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Noer Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000.
- Riasa Putu dkk, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, BAPPENAS dan DEP DAGRI, Jakarta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suryono Agus, *Teori dan Isi Pembangunan*, UM Press Universitas Negeri Malang, Malang, 2001.
- Teguh Yuwono, *Manajemen Ekonomi Daerah : Pembangunan Daerah berdasarkan Paradigma Baru. Clyaspps Diponegoro Universiti, Semarang, 2011*

Widjaja H.A.W, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Jaya Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Jurnal :**

Ahmad Mustanir Darmiah, *Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sindenreng Rampung*, Jurnal Politik Profetik. Vol. 4 No. 2 Tahun 2016

Ardianto Asdi Sangki dkk, *Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1 Tahun 2011

Hadi Krishno dkk, *Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Layanan Malang Online)*, Journal Of Government and Civil Society, Vol. 4 No. 1 April 2020

Liong Tundunaung dkk, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa*

*Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1 Tahun 2006.

Miftahul Huda Muhammad, *Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019

Nurdin Mulawati Heny Andi, *Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) melalui E-Government*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), Vol. 5 No. 1/Juni 2018.

Rian Raden Grianom, *Pengelolaan Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR!) dalam Mewujudkan Open Government di Kabupaten Bojonegoro*, Journal Polical Science. 2017

Selfia Mega Senja, Afifuddin, Sekarsari Retno Wulan, *Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Open Government Patnership (OGP) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Respon Publik, Vol 14 No. 5 Tahun 2010.